

KESEHATAN

Terkait Penyebaran Varian Delta, 10 Provinsi Diminta Tingkatkan Testing dan Tracing

Update - [WARTAKESEHATAN.CO.ID](https://wartakeehatan.co.id)

Aug 19, 2021 - 08:24



JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan, positivity rate dan testing rate adalah indikator penting dalam menilai status transmisi atau penularan COVID-19. WHO juga merekomendasikan untuk suatu wilayah mampu melakukan testing minimal 1 orang per 1.000 penduduk per minggu untuk mengukur upaya surveilans yang dilakukan.

“Pekan lalu, seluruh provinsi mampu mencapai testing rate yang ditetapkan. Walaupun begitu dengan kapasitas yang ada, sesuai dengan instruksi, kita mampu dan akan terus menargetkan testing mencapai 400.000 tes per hari,” ujar dr. Nadia, Kamis (19/08/2021).

Dia menambahkan, upaya penemuan kasus dilakukan dengan memprioritaskan populasi yang berisiko tinggi untuk menularkan virus, yaitu pasien dengan kriteria suspek dan juga kontak erat. Pembelajaran yang terjadi di Jawa dan Bali hendaknya menjadi kewaspadaan bagi provinsi-provinsi di luar Jawa dan Bali, terutama karena adanya varian baru.

“Kita berharap dan terus berupaya untuk melokalisasi setiap wilayah yang berpotensi munculnya kluster-kluster dan penularan aktif,” ujarnya.

Dia menegaskan, varian delta merupakan varian baru yang saat ini mulai mendominasi pelaporan varian di hampir seluruh negara di dunia. Varian ini harus selalu diwaspadai karena memiliki kemampuan penularan dan potensi gejala dan keparahan yang lebih tinggi.

dr. Nadia memastikan, Indonesia terus berupaya melakukan kegiatan sekuensing untuk memantau penyebaran varian baru, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Per tanggal 18 Agustus 2021, sudah lebih dari 5.000 sekuensing dilakukan dengan 80% hasil adalah varian delta.

Dia mengimbau pemerintah daerah di beberapa wilayah untuk lebih waspada dan meningkatkan testing dan tracing mengingat dominasi varian delta yang terdeteksi. Beberapa wilayah yang dimaksud adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

dr. Nadia mengingatkan, bagi provinsi atau daerah lain yang belum melaporkan atau belum menemukan varian ini juga untuk tetap waspada. Pemerintah daerah diharapkan aktif meningkatkan upaya testing dan tracing, dan melaporkan kasus-kasus yang masuk kriteria untuk dilakukan pemeriksaan sekuensing ke laboratorium rujukan.

“Sekali lagi, upaya pengendalian dan vaksinasi yang kita lakukan saat ini masih terbukti efektif untuk mencegah penularan, dan mencegah keparahan dan kematian akibat infeksi varian delta ini,” ujar dr. Nadia.

Dia juga mengungkapkan, lebih dari 60 ribu kasus yang tercatat sebagai kasus aktif adalah kasus-kasus yang terkonfirmasi positif lebih dari 21 hari yang lalu. Besar kemungkinan kasus-kasus ini telah sembuh atau meninggal dunia. Menurutnya, beberapa provinsi dengan yang kemungkinan harus memperbarui status kasus aktif lebih dari seribu kasus adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Sumatera Utara, Jawa Timur, Maluku, dan Kalimantan Tengah.

dr. Nadia memastikan, Kementerian Kesehatan sedang bekerja bersama provinsi-provinsi dan kabupaten/kota terkait untuk menyelesaikan updating status kasus-kasus ini.

“Karena kasus-kasus ini akan dirilis pada tanggal mereka dilaporkan, masih akan

terjadi lonjakan-lonjakan jumlah kasus meninggal dan sembuh, dan mungkin juga kasus konfirmasi, akibat updating status dan rilis kasus lama ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate juga mengingatkan daerah-daerah yang terdeteksi ditemukan varian Delta untuk menyiapkan berbagai langkah mencegah penyebaran lebih luas. Pemerintah daerah diminta aktif untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat baik agar bisa sinergis dalam melakukan penanganan COVID-19.

Johnny juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan cakupan vaksinasi kepada masyarakat. Vaksin yang telah tiba di daerah segera disuntikkan kepada masyarakat.

"Agar herd immunity segera terbentuk dan semoga pandemi bisa dikendalikan, " ujar Menkominfo. (***)